

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN  
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2003 – 2018**

**(Studi Kasus di 5 Kabupaten Provinsi D.I.Y Periode 2003 – 2018)**



Nama : Aulia Mukti Bagus Prayoga

Nomor Mahasiswa : 12313117

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2019**

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah  
Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003 – 2018**

**(Studi Kasus di 5 Kabupaten Provinsi D.I.Y Periode 2003 – 2018)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Aulia Mukti Bagus Prayoga

Nomor Mahasiswa : 12313117

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam tindakan plagiasi karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Oktober 2019

Penulis,



Aulia Mukti Bagus Prayoga

PENGESAHAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penganggaran dan Belanja Pemerintah  
Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2003 – 2018

(Studi Kasus di 5 Kabupaten Provinsi D.I.Y Periode 2003 – 2018)

Nama : Aulia Mukti Bagus Prayoga

Nomor Mahasiswa : F2313117

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 4 Oktober 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Suharto, SE., M.Si.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya.*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada seluruh keluargaku,*

*Aku hanya ingin membuat kalian bangga,*

*Walau kadang tak sesuai dengan apa yang aku harapkan.*

*Ibu, wanita tegar, wanita terkuat dan sosok sempurna yang ku miliki.*

*Cinta dan kasih sayang tulusmu,*

*Serta doa yang selalu menyelimuti di setiap langkahku.*

*Kemanapun aku pergi, dimana pun aku ditempatkan, doamu selalu mengiringi.*

*Bapak, lelaki panutanku, yang tak banyak bicara dan terkesan tidak peduli.*

*Tetapi yang ada didalam hatinya adalah cinta dan kasih sayang kepada anaknya.*

*Saudara kandungku atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, kepercayaan dan  
doa tulus yang selalu dipanjatkan untukku.*

*Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.*

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN BELANJA  
PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE 2003 - 2018

Disusun Oleh : AULIA MUKTI BAGUS PRAYOGA  
Nomor Mahasiswa : 12313117

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS  
Pada hari Selasa, tanggal: 12 November 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Lak Lak Nazhat El Hasnah, SE., M.Si.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Lak Lak Nazhat El Hasnah, SE., M.Si, Ph.D.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang memberikan jalan kemudahan dan keteguhan hati, karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003–2018”. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Suharto, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Dalam hal ini penulis menyadari atas adanya keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dan dengan keterbatasan ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

- 1) Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat Iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 2) Bapak Suharto, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama pengerjaan skripsi ini.
- 3) Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmunya, sehingga dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis.
- 4) Staf Akademik yang telah banyak membantu dalam urusan akademik.
- 5) Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan nasihat serta arahan disetiap masalah kepada penulis.
- 6) Saudara kandung tercinta, yang selalu sabar dalam memberikan bantuan, dukungan, arahan dan doa kepada penulis.



- 7) Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan iringan doa serta menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 ini.
- 8) Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Ekonomi, khususnya Afiat, Ratih dan Sella yang telah membantu memberikan saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali Allah SWT semata, begitu pula dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kelapangan hati penulis mengharapkan kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2019

Penulis,

Aulia Mukti Bagus Prayoga

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Berita Acara Ujian Skripsi .....	v
Halaman Kata Pengantar .....	vi
Halaman Daftar Isi .....	ix
Halaman Daftar Tabel .....	xii
Halaman Daftar Gambar .....	xiii
Halaman Lampiran .....	xiv
Halaman Abstrak .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Kajian Pustaka .....	15
2.1.1. Penelitian Terdahulu .....	15
2.2. Landasan Teori .....	19
2.2.1. Kemiskinan.....	19
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	23

2.2.3. Pengangguran .....	27
2.2.4. Belanja Pemerintah .....	29
2.3. Hubungan Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen .....	34
2.3.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan .....	34
2.3.2. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan .....	35
2.3.3. Hubungan Belanja Pemerintah Dengan Kemiskinan .....	36
2.4. Kerangka Pemikiran .....	37
2.5. Hipotesis Penelitian .....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	40
3.1. Jenis Data .....	40
3.2. Pengumpulan Data .....	40
3.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	41
3.4. Variabel Penelitian .....	41
3.5. Definisi Operasional .....	42
3.6. Metode Analisis Data .....	42
3.7. Uji Asumsi Klasik .....	43
3.8. Pengujian Hipotesis .....	45
3.8.1. Perumusan Hipotesis .....	45
3.8.2. Uji Koefisien Regresi Individual (Uji T) .....	46
3.8.3. Uji Signifikansi Model (Uji F) .....	47
3.8.4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	48
BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....	49
4.1. Deskripsi Data Penelitian .....	49
4.1.1. Deskripsi Kemiskinan .....	49
4.1.2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi .....	51

4.1.3. Deskripsi Pengangguran.....	53
4.1.4. Deskripsi Belanja Pemerintah .....	54
4.2. Hasil dan Analisis .....	57
4.2.1. Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.1.1. Hasil Uji Multikolinearitas .....	57
4.2.1.2. Hasil Uji Autokorelasi.....	58
4.2.1.3. Hasil Uji Normalitas.....	60
4.2.1.4. Hasil Uji Linearitas .....	61
4.2.1.5. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	62
4.2.2. Analisis Regresi Berganda .....	64
4.2.3. Pengujian Statistik .....	66
4.2.3.1. Hasil Uji Koefisien Regresi Individual (Uji T) .....	66
4.2.3.2. Hasil Uji Signifikansi Model (Uji F) .....	67
4.2.3.3. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	68
4.2.4. Pembahasan .....	68
4.2.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.....	68
4.2.4.2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan .....	70
4.2.4.3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan.....	71
4.2.4.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....	74
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Implikasi .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN .....	81

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1. Jumlah Kemiskinan D.I. Yogyakarta .....	4
1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta .....	6
1.3. Jumlah Pengangguran D.I. Yogyakarta.....	9
1.4. Jumlah Belanja Pemerintah D.I. Yogyakarta .....	11
4.1. Jumlah Kemiskinan D.I. Yogyakarta .....	50
4.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta .....	52
4.3. Jumlah Pengangguran D.I. Yogyakarta.....	54
4.4. Jumlah Belanja Pemerintah D.I. Yogyakarta .....	56
4.5. Hasil Uji Multikolinearitas .....	57
4.6. Hasil Uji Autokorelasi.....	59
4.7. Hasil Uji Normalitas .....	60
4.8. Hasil Uji Linearitas .....	61
4.9. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	63
4.10. Hasil Analisis Regresi Berganda .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1. Skema Kerangka Pemikiran ..... 37



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

I. Jumlah Kemiskinan D.I. Yogyakarta Periode 2003-2018 .....	81
II. Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta Periode 2003-2018 .....	82
III. Jumlah Pengangguran D.I. Yogyakarta Periode 2003-2018.....	83
IV. Jumlah Belanja Pemerintah D.I. Yogyakarta Periode 2003-2018.....	84
V. Hasil Uji Multikolinearitas.....	85
VI. Hasil Uji Autokorelasi .....	86
VII. Hasil Uji Normalitas .....	87
VIII. Hasil Uji Linearitas .....	88
IX. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	89
X. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda .....	90



## ABSTRAK

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki struktur perekonomian yang sangat beragam, mata pencaharian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas adalah bercocok tanam, pedagang, dan pengrajin. Di lihat dari segi perekonomian, sektor pendidikan dan sektor pariwisata menjadi sektor utama perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi dengan keberagaman sektor yang ada masih terdapat banyak penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 3) Menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 4) Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* (runtut waktu) dengan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) periode 2003 sampai 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan, Pengangguran berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan, Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan, dan secara bersama-sama ketiga variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah.



## **ABSTRACT**

*Yogyakarta Special Region Province has a very diverse economic structure, the majority of the livelihoods of the people of Yogyakarta Special Region are farming, traders, and craftsmen. In terms of the economy, the education sector and the tourism sector are the main economic sectors in the Special Region of Yogyakarta. But with the diversity of sectors there are still many poor people. This study aims to 1) Analyze the effect of Economic Growth on Poverty in the Special Region of Yogyakarta, 2) Analyze the effect of Unemployment on Poverty in the Special Region of Yogyakarta, 3) Analyze the effect of Government Spending on Poverty in the Special Region of Yogyakarta, 4) Analyze the effect of Economic Growth, Unemployment and Government Spending together against Poverty in the Special Region of Yogyakarta. The data used in this study are time series data using multiple regression analysis methods period 2003 to 2018. The results of this study indicate that Economic Growth has a significant effect and is negatively related to Poverty, Unemployment has a significant and related effect positive on Poverty, Government Spending have no significant effect and positively related to Poverty, and together the three variables Economic Growth, Unemployment and Government Spending have a significant effect on Poverty.*

*Keywords: Poverty, Economic Growth, Unemployment, Government Spending.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian suatu negara dan telah yang menjadi perbincangan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat awam, politikus, hingga para akademisi. Berbagai pendapat tentang kemiskinan bermunculan, baik yang pro ataupun yang kontra, dimulai dari konsep kemiskinan, penyebab, dampak, cara mengukur, hingga cara mengatasi kemiskinan itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi dalam perekonomian suatu negara seperti kemiskinan akan menjadi permasalahan yang krusial, terutama di negara kurang berkembang dan negara berkembang seperti di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya menjadi bahasan masalah bagi negara kurang berkembang dan negara berkembang saja, kemiskinan juga menjadi bahasan masalah bagi negara-negara maju karena kemiskinan juga melanda negara-negara maju diseluruh dunia. Permasalahan kemiskinan di suatu negara perlu diperhatikan secara mendalam karena kemiskinan akan mengakibatkan sulitnya masyarakat suatu negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Definisi kemiskinan yakni kualitas hidup yang rendah atau kondisi ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam mencukupi kebutuhan

pokoknya. Kondisi ini dapat diidentifikasi dengan tingkat pendapatan yang rendah sehingga seseorang tidak mampu untuk mencukupi standar kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai fenomena multidimensi yang dapat diukur dengan banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan diukur dengan menggunakan tolak ukur kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dapat dikatakan miskin apabila seseorang tersebut berada dibawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati.

Menurut Maipita, I (2014: 3) penyebab kemiskinan dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, tetapi secara garis besar kemiskinan dapat ditimbulkan oleh adanya perbedaan, baik perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan maupun perbedaan sumberdaya. Kemiskinan jika dilihat dari dampaknya dapat menimbulkan suatu kondisi dimana seseorang atau masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasarnya, sehingga seseorang atau masyarakat tersebut dikatakan tidak mampu untuk mencapai standar kebutuhan hidup yang layak dan akan mengakibatkan persoalan sosial dan ekonomi.

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja, keterbatasan dan sulitnya akses terhadap kepemilikan modal, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya

yang tidak efisien dan tingginya pertumbuhan penduduk (Sharp *et al.* dalam Maipita. I, 2014).

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya, dengan kata lain penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan adalah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah jumlah penghitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan meliputi 52 jenis komoditi, seperti padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan, daging, ikan, telur dan susu, kacang-kacangan, sayuran, minyak dan lemak, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan juga kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan meliputi 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki grafik kemiskinan dari periode 2003-2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Kemiskinan D.I. Yogyakarta periode 2003-2018**

No	Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)
1	2003	636.8
2	2004	616.2
3	2005	625.8
4	2006	648.7
5	2007	633.5
6	2008	608.9
7	2009	544.9
8	2010	540.5
9	2011	564.2
10	2012	565.7
11	2013	541.9
12	2014	532.5
13	2015	550.2
14	2016	494.9
15	2017	488.5
16	2018	460.1

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*

Tabel 1.1 menjelaskan tentang jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Pada tahun 2006 jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 648.7 ribu jiwa dan angka tersebut menjadi yang tertinggi, sedangkan pada tahun

2018 jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 460.1 ribu jiwa dan menjadi yang terendah selama periode 2003 sampai 2018. Jika dilihat secara menyeluruh pada periode 2003-2018, jumlah kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun meski tidak secara signifikan.

Penurunan dalam jumlah kemiskinan mengindikasikan bahwa pembangunan yang dijalankan disuatu wilayah membawa sebuah keberhasilan. Saat perekonomian di suatu wilayah dapat berkembang, tentu akan menambah pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang jika terkelola dengan baik akan berdampak pada penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini berarti, pertumbuhan ekonomi memiliki andil yang penting dalam mengatasi penurunan jumlah kemiskinan (Kuncoro dalam Asrianti, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur dalam suatu pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan yang sangat erat dengan permasalahan kemiskinan, baik hubungan secara menyeluruh maupun hubungan secara individu pada sektor ekonomi.

Grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi di Daerah istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta  
periode 2003-2018**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2003	4,58
2	2004	5,14
3	2005	4,73
4	2006	3,69
5	2007	4,31
6	2008	5,02
7	2009	4,39
8	2010	4,87
9	2011	5,16
10	2012	5,32
11	2013	5,40
12	2014	5,18
13	2015	4,95
14	2016	5,05
15	2017	5,41
16	2018	7,50

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*

Tabel 1.2 menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018

sebesar 7,50%, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 3,69%. Jika dilihat secara menyeluruh pada periode 2003-2018, perkembangan pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan meskipun tidak secara signifikan karena terjadi kenaikan dan penurunan di beberapa tahun tertentu.

(Maipita, I *et al.* 2010) pembangunan ekonomi jika dilihat dalam tatanan kebijakan dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian pertumbuhan dan pemerataan yang tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi saja, kemungkinan hanya akan menguntungkan sebagian dari masyarakat dan akan menyisihkan sebagian besar masyarakat yang miskin, sedangkan jika memprioritaskan pemerataan saja tanpa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masyarakat tidak akan sejahtera karena hanya akan berputar pada pemerataan kemiskinan. Perlu adanya penyusunan kebijakan dalam perekonomian suatu wilayah untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan mengurangi kemiskinan (*pro-poor*).

Pelaksanaan pembangunan yang tepat akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan harapan dapat menanggulangi berbagai permasalahan dalam pembangunan serta sosial kemasyarakatan, seperti permasalahan kemiskinan. Aspek penting lainnya dalam melihat kinerja pembangunan selain pertumbuhan ekonomi adalah ketepatan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia sehingga akan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada



peningkatan produksi barang atau jasa yang dihasilkan dan akan membutuhkan jumlah pekerja yang semakin besar untuk dapat memproses hasil produksi tersebut. Hal ini dapat berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan akan menurunkan jumlah kemiskinan.

Pengangguran merupakan masalah utama yang dihadapi di kebanyakan wilayah. Pengangguran menjadi permasalahan sosial didalam masyarakat yang mayoritas hidup dalam perekonomian menengah ke bawah dan akan menyebabkan produktivitas serta pendapatan masyarakat menjadi berkurang sehingga akan menimbulkan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, tingkat urbanisasi yang tinggi, ketidakmampuan pemerintah serta sektor swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang seimbang serta banyaknya pencari kerja yang yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya pengangguran di suatu wilayah.

Menurut Sukirno, S dalam Susiatun, E (2018) pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang tergolong ke dalam golongan angkatan kerja dan berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperoleh pekerjaan. Seseorang atau sekelompok orang yang sedang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak termasuk ke dalam golongan pengangguran.

**Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran D.I. Yogyakarta periode 2003-2018**

No	Tahun	Pengangguran (Ribu Jiwa)
1	2003	143.89
2	2004	113.56
3	2005	93.50
4	2006	117.02
5	2007	115.20
6	2008	107.33
7	2009	121.04
8	2010	107.14
9	2011	83.48
10	2012	76.81
11	2013	63.17
12	2014	67.41
13	2015	80.24
14	2016	57.03
15	2017	64.01
16	2018	73.35

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*

Jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.3 diatas. Jumlah pengangguran cenderung mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa tahun walaupun tidak secara signifikan. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 143.89 ribu jiwa,

sedangkan jumlah pengangguran terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 57.03 ribu jiwa.

Masalah pengangguran dapat menyebabkan efek buruk yang bersifat ekonomi ataupun bersifat sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang ditimbulkan, pemerintah perlu secara terus-menerus mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pengangguran. Perlu adanya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk dijalankan dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran.

Intervensi atau campur tangan dari pemerintah didalam perekonomian akan selalu ada. Peranan pemerintah dalam suatu perekonomian adalah sebagai aktor yang melaksanakan tugas serta fungsi daerah. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat disuatu daerah. Salah satu kebijakan dari pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu daerah adalah belanja pemerintah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditujukan untuk manajemen kebutuhan publik. Ketetapan dalam penggunaan belanja pemerintah yang ideal adalah yang dapat memicu aktifitas ekonomi dan mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

**Tabel 1.4 Jumlah Belanja Pemerintah D.I. Yogyakarta  
periode 2003-2018**

No	Tahun	Belanja Pemerintah (Ribu Rp)
1	2003	524.487.355
2	2004	670.712.040
3	2005	768.498.592
4	2006	968.386.066
5	2007	1.067.390.920
6	2008	1.629.069.251
7	2009	1.412.048.985
8	2010	1.394.446.100
9	2011	1.590.785.711
10	2012	2.053.825.959
11	2013	2.509.643.374
12	2014	2.981.068.320
13	2015	3.911.107.930
14	2016	4.270.072.673
15	2017	5.279.617.119
16	2018	5.608.293.291

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah belanja pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki

kesejahteraan masyarakat serta ditujukan agar kebijakan belanja pemerintah dapat berkontribusi bagi golongan-golongan miskin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan mengulas lebih dalam mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003-2018”. Alasan dilakukannya penelitian ini karena pada penelitian sebelumnya dilakukan dilokasi yang berbeda, penelitian ini dilakukan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Yogyakarta. Selain itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini, akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, variabel Pengangguran dan variabel Belanja Pemerintah di tiap Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018, baik pengujian tiap variabel independen (bebas) maupun keseluruhan variabel independen (bebas) secara simultan atau bersama-sama. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) dan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
2. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
3. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018
2. Mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018
3. Mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018

4. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam upaya merancang kebijakan dan program sehubungan dengan masalah pengentasan kemiskinan.
2. Sebagai masukan informasi untuk pemerintah daerah tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah mempengaruhi kemiskinan.
3. Sebagai penerapan ilmu dan wawasan yang didapatkan oleh penulis saat proses perkuliahan.
4. Sebagai sumber dan bahan referensi bagi pengembang ilmu dalam melakukan penelitian pada tahun-tahun berikutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Penelitian Terdahulu

Waruwu, S.J (2016) pada penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014”, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data Bank Indonesia (BI), data BAPPENAS dan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terdiri dari data kemiskinan, data pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, data belanja pemerintah dan data investasi dari tahun 1995 sampai tahun 2014. Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan, belanja pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, sementara investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995-2014.

Asrianti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap



Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia periode 2007 sampai dengan 2016 berupa data sekunder dan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007-2016.

Nisbah, F (2018) pada penelitiannya menggunakan data sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan teknik analisis regresi data panel yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian pada “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo dan Langkat” ini bahwa pengangguran memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini dikarenakan pada setiap tahunnya jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas (pelajar dan mahasiswa) terus mengalami peningkatan, namun mereka masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, karena mereka masih berada dalam tanggungan orang tua. Faktor selain itu karena terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sementara pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan memiliki hubungan positif.

Susiaturun, E (2018) pada penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016”, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang berkaitan dengan data pertumbuhan penduduk, data pengangguran dan data kemiskinan di Provinsi Lampung. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Kesimpulan pada penelitian ini pertumbuhan penduduk dan pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung dan kemiskinan menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah atau mengalami fluktuasi.

Fadlillah, N *et al.* (2016) dalam penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013” menggunakan analisis data panel dan menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan

penduduk tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Irhamni (2018) dalam penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015” menggunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 1986 sampai dengan tahun 2015 yang meliputi data jumlah penduduk miskin, data pengangguran dan data pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) serta *World Bank*. Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk dan pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif.

Fasholla, R.T (2018) dalam penelitian tentang “Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011-2016” menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap. Peneliti menggunakan metode analisis data panel yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section* dan menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah dan

jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan berhubungan positif, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan tetapi berhubungan negatif terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Kemiskinan**

Bayo dalam Asrianti (2017) tidak sedikit yang menganggap kemiskinan sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, nyatanya kemiskinan memiliki sifat yang sangat luas dan juga multidimensional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah kemiskinan, namun jumlah kemiskinan cenderung mengalami peningkatan bertepatan dengan kenaikan kebutuhan hidup masyarakat.

Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda sehingga memiliki banyak dimensi. Kemiskinan kerap dihubungkan dengan dimensi ekonomi agar lebih mudah dalam mengamati dan mengukurnya, padahal terdapat dimensi-dimensi lain yang memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan, seperti dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, budaya dan yang lainnya. Namun perlu untuk melakukan pengukuran kemiskinan secara multidimensi agar suatu rumusan kebijakan dalam upaya menurunkan kemiskinan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan (Suryawati dalam Fadlillah. N, 2016).

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hak-hak dasarnya berupa makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, kesehatan, pekerjaan, pertanahan, sumber daya alam, sumber daya lingkungan, terbebas dari kriminalisme, dan hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial guna mengembangkan serta mempertahankan kehidupan yang lebih baik.

*World Bank (2001)* mengartikan kemiskinan sebagai “*Poverty is to be hungry, to lack shelter and clothing, to be sick and not cared for, to be illiterate and not schooled*”. Kemiskinan berarti kelaparan, ketiadaan tempat tinggal dan pakaian, menjadi sakit dan tidak dirawat, buta huruf dan tidak sekolah. Dalam bentuk sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya, dengan kata lain penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan adalah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah jumlah penghitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang

disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan meliputi 52 jenis komoditi, seperti padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan, daging, ikan, telur dan susu, kacang-kacangan, sayuran, minyak dan lemak, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan juga kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan meliputi 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dalam mengukur Garis Kemiskinan dapat dihitung dengan perhitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Menurut Todaro dalam Fasholla, R.T (2018) ciri-ciri masyarakat miskin yaitu :

- 1) Perbedaan geografis, yaitu jumlah penduduk dan tingkat pendapatan.
- 2) Perbedaan sejarah, dikarenakan sebagian dijajah oleh negara yang berlainan.
- 3) Perbedaan kekayaan SDA dan kualitas SDM.
- 4) Perbedaan peranan sektor negara dan swasta.
- 5) Perbedaan struktur industri.
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi serta politik negara lain.
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Maipta, I (2014: 29) kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan Struktural atau Buatan (*man made poverty*) merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi dan keamanan yang akan menyebabkan kondisi sosial masyarakat menjadi rendah (*underdevelopment trap*) atau tidak mungkin sejahtera.
- 2) Kemiskinan Alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan SDA, sehingga peluang untuk melakukan dan meningkatkan produksi relatif kecil serta tingkat efisiensi produksinya relatif rendah.
- 3) Kemiskinan Kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, enggan bekerja keras sehingga etos kerjanya rendah dan tidak disiplin.
- 4) Kemiskinan Absolut merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang biasanya didasarkan pada sejumlah kebutuhan nutrisi.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin. *World Bank* dalam Wibowo, M.E (2014) menyebutkan ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

- 1) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan serta pendidikan).

- 2) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
- 3) Rentan akan guncangan ekonomi dan terkait dengan ketidakmampuan dalam menanggulangnya.

### 2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan dalam kegiatan perekonomian suatu daerah yang mengakibatkan bertambahnya hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Sukirno. S, 2011: 9). Peningkatan hasil produksi serta pendapatan masyarakat akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat yang dapat ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik.

Tarigan dalam Suryani, E (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai pertambahan pendapatan masyarakat suatu daerah yang terjadi secara menyeluruh berupa kenaikan pada keseluruhan nilai tambah (*added value*).

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur serta corak dalam kegiatan perekonomian (Sukirno. S, 2011: 423). Pelaksanaan suatu kebijakan dalam pembangunan ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan suatu parameter untuk mengetahui apakah pelaksanaan



kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah perlu dilakukan perhitungan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang pada umumnya dilakukan dalam rentang waktu satu tahun.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional dapat diketahui dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB), dan untuk tingkat daerah dapat diketahui dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto (PDB) dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi/dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi/dihasilkan dalam satu periode tertentu yang pada umumnya hanya mengukur pertumbuhan perekonomian di tingkat wilayah provinsi atau kabupaten saja.

Dalam mengukur sebuah kemajuan perekonomian suatu daerah, dapat menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi karena lebih efisien dalam menilai kesejahteraan penduduk disuatu daerah. Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, dapat dilakukan dengan membagi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk daerah tertentu, atau disebut dengan PDRB rata-rata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan (*current price*) dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi di suatu daerah.
- 2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun acuan dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), berikut perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) :

$$G_t = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

$G_t$  = Pertumbuhan Ekonomi

$\text{PDRB}_t$  = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun tertentu

$\text{PDRB}_{t-1}$  = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya

Perkembangan teori pertumbuhan ekonomi sejak pertama kali sudah dikemukakan oleh Adam Smith didalam bukunya yang berjudul “*The Wealth of Nations*” pada tahun 1776 (Sukirno. S, 2011: 432).

Teori-teori di dalam pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Teori Pertumbuhan Klasik, teori ini dikemukakan oleh para ahli ekonomi klasik yang membagi pengaruh pertumbuhan ekonomi menjadi empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan walaupun teori ini lebih menitikberatkan perhatiannya pada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.
- 2) Teori Schumpeter, teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dimana pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat inovasi di dalam kegiatan ekonomi.
- 3) Teori Harrod-Domar, teori ini bertujuan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) dalam jangka yang panjang.
- 4) Teori Pertumbuhan Neo Klasik, teori ini dinilai sebagai perluasan dari teori Keynes dan teori Harrod-Domar yang melihat persoalan pertumbuhan dari segi permintaan, teori ini menekankan pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat melalui

kenaikan investasi dan bertambah secara terus-menerus sampai pada tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan.

### 2.2.3. Pengangguran

Menurut Mankiw. N.G, (2006: 154) pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang paling berat dan dapat mempengaruhi manusia secara langsung. Hal itu dikarenakan saat seseorang kehilangan suatu pekerjaan akan mengakibatkan penurunan standar kehidupan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kecemasan psikologis. Masalah pengangguran kerap diperdebatkan dalam suatu debat politik dan menjadi pembahasan yang sudah tidak asing lagi bagi para politisi bersamaan dengan tawaran kebijakan untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar dapat membantu menurunkan jumlah pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sukirno, S (2011: 328) membedakan jenis-jenis pengangguran menjadi dua golongan, yang pertama adalah jenis pengangguran yang berdasar kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut, dan yang kedua adalah jenis pengangguran yang berdasar kepada ciri-ciri dari pengangguran tersebut.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengangguran Normal atau Pengangguran Friksional merupakan pengangguran yang disebabkan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan sesuai dengan keahliannya.
- 2) Pengangguran Siklikal merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
- 3) Pengangguran Struktural merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh adanya perubahan struktur dalam kegiatan ekonomi.
- 4) Pengangguran Teknologi merupakan pengangguran akibat dari penggunaan mesin serta kemajuan teknologi.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengangguran Terbuka merupakan pengangguran yang timbul akibat dari penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja.
- 2) Pengangguran Tersembunyi merupakan pengangguran yang timbul akibat dari jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan.

- 3) Pengangguran Bermusim merupakan pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun yang umumnya terjadi pada sektor pertanian, dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.
- 4) Setengah Menganggur merupakan pengangguran sepenuh waktu atau bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jam kerja normal di Indonesia adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam dalam seminggu termasuk golongan setengah menganggur.

#### **2.2.4. Belanja Pemerintah**

Menurut Mangkoesoebroto dalam Wibowo, M.E (2014) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Definisi belanja daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat 13 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Belanja Daerah dalam Fasholla, R.T (2018), belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran karena dalam menyusun laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi serta fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja dalam melaksanakan suatu aktifitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara umum dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu :

- 1) Belanja Administrasi Umum adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang tidak saling berhubungan dengan aktifitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu :
  - a) Belanja Pegawai adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk orang atau personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktifitas, dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
  - b) Belanja Barang adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  - c) Belanja Perjalanan Dinas adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

- d) Belanja Pemeliharaan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- 2) Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik adalah semua pengeluaran yang berasal dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktifitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi :
- a) Belanja Pegawai adalah keseluruhan biaya yang berasal dari pemerintah daerah untuk orang atau personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktifitas, dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang sifatnya variabel.
  - b) Belanja Barang adalah keseluruhan biaya dari pemerintah daerah yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  - c) Belanja Perjalanan adalah keseluruhan biaya dari pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  - d) Belanja Pemeliharaan adalah keseluruhan biaya dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.
- 3) Belanja Modal didefinisikan sebagai keseluruhan biaya yang berasal dari pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang kemudian akan



menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal terdiri dari :

- a) Belanja Publik merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa serta pembelian mobil ambulans.
- b) Belanja Aparatur merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi akan dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh dari belanja aparatur yaitu pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan serta pembangunan rumah dinas.
- 4) Belanja Transfer merupakan suatu pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa ada harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Belanja transfer terdiri atas pembayaran :
  - a) Angsuran Pinjaman
  - b) Dana Bantuan
  - c) Dana Cadangan
- 5) Belanja Tak Tersangka didefinisikan sebagai keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan yang tidak tersangka serta kejadian-kejadian luar biasa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Belanja, mendefinisikan belanja daerah sebagai suatu kewajiban daerah yang mencakup keseluruhan biaya yang berasal dari kas umum daerah untuk mengurangi ekuitas dana dan dilakukan dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diterima pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal

2) Belanja Tidak Langsung didefinisikan sebagai belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yaitu :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Bunga
- c) Belanja Subsidi
- d) Belanja Hibah
- e) Belanja Bantuan Sosial
- f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa.

## 2.3. Hubungan Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen

### 2.3.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan

Menurut Sukirno, S dalam Waruwu, S.J (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Dalam mengukur pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto saja, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana distribusi pendapatan menyebar kepada lapisan masyarakat dan pihak-pihak yang sudah menikmati hasilnya. Penurunan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah akan berakibat pada keterbatasan kualitas pendapatan penduduk, yang pada akhirnya akan membuat pola kebutuhan pokoknya menjadi berubah ke barang-barang dengan harga yang lebih rendah dengan kuantitas lebih sedikit.

Fane dan War dalam Maipita, I (2014: 63) jika pertumbuhan yang dapat meningkatkan *return* terhadap faktor yang merupakan sumber pendapatan bagi penduduk miskin semakin besar, maka akan semakin besar pula kemungkinan dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Menurut Siregar dan Wahyuniarti dalam Asrianti (2017) kemiskinan merupakan suatu kondisi rendahnya tingkat pendapatan tahunan seseorang disuatu daerah tidak lagi mampu untuk memenuhi rata-rata pengeluaran terendah yang dibutuhkan oleh seseorang guna menjalani

kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang menjalani kehidupan dibawah rata-rata pengeluaran tersebut termasuk kedalam golongan miskin. Berkembangnya perekonomian suatu daerah akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang jika tersalurkan dengan baik diantara masyarakat akan berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting untuk menurunkan angka kemiskinan disuatu daerah.

Kuznet dalam Nisbah, F (2018) terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kemiskinan pada tahap awal pelaksanaan pembangunan ekonomi dan terjadi penurunan kemiskinan pada tahap akhir pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

$H_1$  : Diduga PE memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap JK

### **2.3.2. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan**

Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang seringkali dijumpai di sebagian masyarakat suatu daerah, karena pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang saling berhubungan dan sudah sangat melekat pada masyarakat yang memiliki perekonomian rendah.

Arsyat dalam Asrianti (2017) menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tidak meratanya distribusi pendapatan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Menurut sebagian besar dari mereka yang

tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan penuh, mereka akan terus-menerus berada diantara kelompok masyarakat miskin, sedangkan mereka yang memiliki pekerjaan tetap serta penghasilan yang cukup umumnya termasuk diantara kelompok masyarakat menengah atas.

Menurut Todaro dalam Nisbah, F (2018) pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat. Rendahnya kualitas hidup masyarakat dijabarkan ke dalam rendahnya tingkat pendapatan, tempat tinggal tidak memadai, kesehatan yang buruk, pendidikan terbatas, rendahnya angka fertilitas, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat serta rendahnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Rendahnya kesempatan dalam memperoleh suatu pekerjaan berarti pengangguran. Tingginya angka pengangguran disuatu daerah akan berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga akan jatuh miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan.

H<sub>2</sub> : Diduga JP memiliki pengaruh signifikan positif terhadap JK

### **2.3.3. Hubungan Belanja Pemerintah Dengan Kemiskinan**

Menurut Noor dalam Waruwu, S.J (2016) belanja pemerintah dari sisi ekonomi publik ditujukan untuk manajemen pemenuhan kebutuhan publik dengan pemerintah sebagai pihak yang berperan untuk menjalankan tugas serta fungsi daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah.

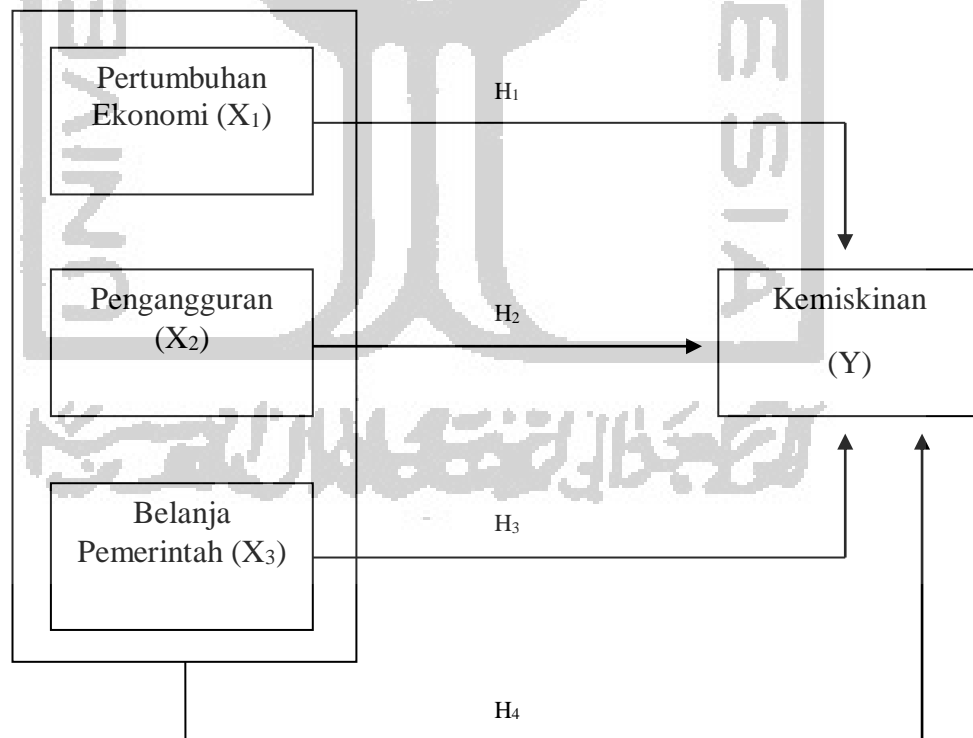
Amalia dalam Irhamni (2018) pengeluaran yang terdapat pada belanja pemerintah menjadi salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

H<sub>3</sub> : Diduga BP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap JK

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disertai dengan kerangka pemikiran yang menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**



Untuk mengupayakan pengurangan kemiskinan, perlu untuk mengetahui penyebab apa saja yang berdampak pada kemiskinan. Penyebab-penyebab yang berdampak terhadap Kemiskinan pada penelitian ini adalah : Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah. Dengan mengetahui penyebab apa saja yang berdampak terhadap Kemiskinan, peneliti berharap dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan program yang tepat yaitu mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2.5. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dalam suatu penelitian diartikan sebagai suatu dugaan yang belum terbukti dan masih lemah kebenarannya sehingga perlu untuk diuji. Berikut adalah hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini :

- 1) Diduga Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
- 2) Diduga Pengangguran memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
- 3) Diduga Belanja Pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

- 4) Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Data**

Jenis data pada penelitian ini adalah data *time series* (runtut waktu). Data *time series* merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu dan dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu atau berkelanjutan (Widarjono, 2013: 9).

#### **3.2. Pengumpulan Data**

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah data primer, merupakan data yang didapatkan secara langsung dari obyek, baik melalui metode wawancara, kuesioner, telepon dan lain-lain. Data yang kedua adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang pada umumnya data ini sudah siap dipakai dan mudah untuk diperoleh serta tersebar luas diberbagai sumber (Widarjono, 2013: 8). Sumber data pada penelitian ini bersumber dari :

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Melakukan studi pustaka dengan cara menganalisis teori-teori yang terdapat pada penelitian ini yang bersumber dari buku serta publikasi.
- 4) Sumber lain yang sesuai.

### 3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah untuk membahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemiskinan dengan melakukan penelitian di 5 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 sebagai pendukung penelitian.

### 3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, lalu kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 60). Pada penelitian tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003-2018” ini mengkaji dua variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang menjadi akibat dari adanya perubahan yang ditimbulkan oleh variabel independen (bebas), sedangkan variabel independen (bebas) merupakan variabel yang membawa pengaruh atau menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel dependen (terikat). Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebagai ( $X_1$ ), Pengangguran sebagai ( $X_2$ ) dan Belanja Pemerintah sebagai ( $X_3$ ), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kemiskinan sebagai ( $Y$ ) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3.5. Definisi Operasional

Terdapat tiga variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y) dalam penelitian ini. Definisi operasional tiap-tiap variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan (Y) : Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 yang dinyatakan hidup dibawah garis kemiskinan dalam satuan ribu jiwa.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>) : Tingkat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 yang diukur dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dalam satuan persen.
- 3) Pengangguran (X<sub>2</sub>) : Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 yang diukur dari jumlah pengangguran terbuka dalam satuan ribu jiwa.
- 4) Belanja Pemerintah (X<sub>3</sub>) : Jumlah belanja yang yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 menurut angka belanja daerah dalam satuan ribu rupiah.

### 3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square = OLS*) dan menggunakan alat pengolahan data *Eviews 7*. Analisis regresi berganda merupakan

regresi yang terdiri lebih dari satu variabel independen (bebas). Metode kuadrat terkecil digunakan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan cara mencari nilai minimal untuk jumlah kuadrat kesalahan antara nilai prediksi dengan nilai kenyataannya.

### 3.7. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang layak, data yang ingin di regresi pada penelitian ini harus memenuhi uji asumsi klasik, diantaranya :

- 1) Uji Multikolinearitas, dimaksudkan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen (bebas). Apabila terjadi kolerasi antara variabel independen, maka terdapat masalah multikolineritas pada model regresi tersebut. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat pada tabel *Centered VIF*. Jika nilai *Centered VIF*  $> 5$  maka telah terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai *Centered VIF*  $< 5$  maka tidak terjadi multikolinearitas.
- 2) Uji Autokorelasi, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada suatu model regresi. Guna memastikan apakah model regresi linier terbebas dari autokorelasi, penelitian ini menggunakan metode *Brusch-Godfrey* atau *LM (Lagrange Multiplier) Test*. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dapat dilihat pada nilai Probabilitas *F-statistic*. Jika nilai

Probabilitas  $F\text{-statistic} > \alpha = 5\%$  maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika nilai Probabilitas  $F\text{-statistic} < \alpha = 5\%$  maka terjadi autokorelasi.

- 3) Uji Normalitas, merupakan data residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, bukan variabel independen ataupun variabel dependennya. Dalam penelitian ini, pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidaknya menggunakan *Jarque-Bera Test* dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (*Jarque-Bera*) hitung dengan tingkat  $\alpha$  ( $\alpha$ ). Jika Probabilitas JB hitung  $> \alpha = 5\%$  maka residual terdistribusi normal, sebaliknya jika JB hitung  $< \alpha = 5\%$  maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi dengan normal.
- 4) Uji Linearitas, ditujukan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dalam penelitian ini pengujian terhadap linieritas menggunakan *Ramsey Reset Test* dengan membandingkan nilai Probabilitas  $F\text{-statistic}$  dengan tingkat  $\alpha$  ( $\alpha$ ). Jika nilai Probabilitas  $F\text{-statistic} > \alpha = 5\%$  maka model regresi memenuhi asumsi linearitas, sebaliknya jika nilai Probabilitas  $F\text{-statistic} < \alpha = 5\%$  maka dapat dikatakan model tidak memenuhi asumsi linearitas.
- 5) Uji Heterokedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroksedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroksedastisitas, peneliti menggunakan Uji *Glejser* dengan membandingkan nilai Probabilitas *F-statistic* dengan tingkat *alpha* ( $\alpha$ ). Jika nilai Probabilitas *F-statistic*  $> \alpha = 5\%$  maka tidak terjadi heteroksedastisitas, sebaliknya jika nilai Probabilitas *F-statistic*  $< \alpha = 5\%$  maka telah terjadi heteroksedastisitas.

### 3.8. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang belum terbukti dan masih lemah kebenarannya sehingga perlu untuk diuji. Hipotesis tersebut meliputi Hipotesis nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berlandaskan pada teori-teori yang ada mengenai hubungan variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah) dengan variabel dependen (Kemiskinan), lalu dilakukan pengujian dengan menggunakan uji koefisien regresi individual (Uji T) dan uji signifikansi model (Uji F).

#### 3.8.1. Rumusan Hipotesis

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

$H_0$  : Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

$H_a$  : Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

2) Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

$H_0$  : Pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

$H_a$  : Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

3) Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

$H_0$  : Belanja Pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

$H_a$  : Belanja Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

### 3.8.2. Uji Koefisien Regresi Individual (Uji T)

Uji koefisien regresi individual (Uji T) dimaksudkan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari tiap-tiap variabel independen yang terdiri atas Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah terhadap kemiskinan yang merupakan variabel dependennya. Uji koefisien regresi individual

dilakukan dengan membandingkan antara nilai Probabilitas *t-statistic* dengan tingkat *alpha* ( $\alpha$ ) = 5%.

$H_0$  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

$H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

Pengukuran uji hipotesis dengan Uji koefisien regresi individual (Uji T) adalah :

- 1) Jika Probabilitas *t-statistic*  $> \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak.
- 2) Jika Probabilitas *t-statistic*  $< \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima.

### 3.8.3. Uji Signifikansi Model (Uji F)

Uji signifikansi model (Uji F) merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi apakah layak atau tidak. Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji signifikansi model dilakukan dengan membandingkan antara nilai Probabilitas *F-statistic* dengan tingkat *alpha* ( $\alpha$ ) = 5%.

$H_0$  : Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.



$H_a$  : Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

Pengukuran uji hipotesis dengan uji signifikansi model (Uji F) adalah :

- 1) Jika Probabilitas  $F\text{-statistic} < \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima.
- 2) Jika Probabilitas  $F\text{-statistic} > \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak.

#### 3.8.4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengukur persentase variasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, atau dapat dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai  $R^2$ .

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **4.1. Deskripsi Data Penelitian**

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pencatatan yang berasal dari instansi-instansi terkait. Data yang diperoleh bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, studi pustaka dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. Untuk menjelaskan dan menguji data variabel independen dan variabel dependen penulis menggunakan data jumlah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran dan belanja pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Pada bagian ini akan disajikan deskripsi data secara rinci dari setiap variabel yang diperoleh.

##### **4.1.1. Deskripsi Kemiskinan**

Kemiskinan dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Pada tahun 2006 jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 648.7 ribu jiwa dan angka tersebut menjadi yang tertinggi, sedangkan pada tahun 2018 jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 460.1 ribu jiwa dan menjadi yang

terendah selama periode 2003 sampai 2018. Jika dilihat secara menyeluruh pada periode 2003-2018, jumlah kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun meski tidak secara signifikan.

Berikut jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 dalam satuan ribu jiwa yang disajikan dalam tabel 4.1 :

**Tabel 4.1 Jumlah Kemiskinan D.I. Yogyakarta periode 2003-2018**

No	Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)
1	2003	636.8
2	2004	616.2
3	2005	625.8
4	2006	648.7
5	2007	633.5
6	2008	608.9
7	2009	544.9
8	2010	540.5
9	2011	564.2
10	2012	565.7
11	2013	541.9
12	2014	532.5
13	2015	550.2
14	2016	494.9
15	2017	488.5
16	2018	460.1

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*

Menurut Widodo dalam Susiatun, E (2018) kemiskinan adalah permasalahan mendasar yang dialami dan harus diatasi oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya masyarakat miskin memiliki keterbatasan kemampuan dalam berusaha dan keterbatasan dalam mengakses kegiatan dalam perekonomian sehingga akan tertinggal dari masyarakat lainnya.

#### **4.1.2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan hasil produksi yang pengukurannya menggunakan pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi memiliki andil yang penting dalam suatu program pembangunan yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dalam suatu pembangunan ekonomi, perlu untuk memisahkan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan pemerataan distribusi pendapatan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu bisa menjamin distribusi pendapatan yang lebih baik (Todaro dalam Waruwu, S.J, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur suatu kesejahteraan penduduk suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat akan menyebabkan bertambahnya hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan didaerah tersebut, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan penduduk yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah kemiskinan disutu daerah.

Grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi di Daerah istimewa Yogyakarta disajikan dalam tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta periode 2003-2018**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2003	4,58
2	2004	5,14
3	2005	4,73
4	2006	3,69
5	2007	4,31
6	2008	5,02
7	2009	4,39
8	2010	4,87
9	2011	5,16
10	2012	5,32
11	2013	5,40
12	2014	5,18
13	2015	4,95
14	2016	5,05
15	2017	5,41
16	2018	7,50

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 cenderung mengalami peningkatan, walaupun di beberapa periode pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2005, 2006, 2009, 2010 dan pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,50%, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 3,69%.

#### **4.1.3. Deskripsi Pengangguran**

Pengangguran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Tingginya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk yang akan mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan ketersediaan sumber pekerjaan.

Jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa tahun walaupun tidak secara signifikan. Pada tahun 2003 jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 143.89 ribu jiwa dan menjadi yang tertinggi selama periode 2003-2018, sedangkan jumlah pengangguran terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 57.03 ribu jiwa.

Jumlah pengangguran di Daerah istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 disajikan dalam tabel 4.3 dibawah ini :

**Tabel 4.3 Jumlah Pengangguran D.I. Yogyakarta periode 2003-2018**

No	Tahun	Pengangguran (Ribuan Jiwa)
1	2003	143.89
2	2004	113.56
3	2005	93.50
4	2006	117.02
5	2007	115.20
6	2008	107.33
7	2009	121.04
8	2010	107.14
9	2011	83.48
10	2012	76.81
11	2013	63.17
12	2014	67.41
13	2015	80.24
14	2016	57.03
15	2017	64.01
16	2018	73.35

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*

#### **4.1.4. Deskripsi Belanja Pemerintah**

Peranan pemerintah dalam suatu perekonomian sangat penting. Pemerintah berperan sebagai aktor yang melaksanakan tugas serta fungsi daerah agar kegiatan dalam perekonomian dapat mengarah pada arah yang diinginkan. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat disuatu daerah. Salah satu kebijakan dari pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu daerah adalah belanja pemerintah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditujukan untuk manajemen kebutuhan publik.

Ketetapan dalam penggunaan belanja pemerintah yang ideal adalah yang dapat memicu aktifitas ekonomi dan mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dirumuskan dengan baik agar dapat digunakan secara efektif dan juga tepat sasaran. Selain itu, pemerintah diharuskan mampu untuk menjalankan fungsinya yaitu mengalokasikan, menjadi penyalur serta menjadi penyeimbang dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jumlah belanja pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan belanja pemerintah adalah kebijakan dari pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagi golongan miskin agar dapat terlibat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jumlah belanja pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2003-2018 disajikan dalam tabel 4.4 dibawah ini :



**Tabel 4.4 Belanja Pemerintah D.I. Yogyakarta periode 2003-2018**

No	Tahun	Belanja Pemerintah (Ribu Rp)
1	2003	524.487.355
2	2004	670.712.040
3	2005	768.498.592
4	2006	968.386.066
5	2007	1.067.390.920
6	2008	1.629.069.251
7	2009	1.412.048.985
8	2010	1.394.446.100
9	2011	1.590.785.711
10	2012	2.053.825.959
11	2013	2.509.643.374
12	2014	2.981.068.320
13	2015	3.911.107.930
14	2016	4.270.072.673
15	2017	5.279.617.119
16	2018	5.608.293.291

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*

## 4.2. Hasil dan Analisis

### 4.2.1. Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.1.1. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen (bebas). Apabila terjadi kolerasi antara variabel independen, maka terdapat masalah multikolineritas pada model regresi tersebut. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat pada tabel *Centered VIF*. Jika nilai *Centered VIF*  $> 5$  maka telah terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai *Centered VIF*  $< 5$  maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors

Date: 07/26/19 Time: 21:29

Sample: 2003 2018

Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(PERTUMBUHAN_EKO NOMI)	0.015862	194.6121	1.523825
LOG(PENGANGGURAN)	0.004774	455.8052	1.648909
LOG(BELANJA_PEMERINTA H)	4.10E-05	2.246023	1.216942
C	0.201145	947.4927	NA

*Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019*

Pada tabel 4.5 menunjukkan nilai *Centered VIF* tiap-tiap variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai *Centered VIF* sebesar  $1,523825 < 5$ , maka tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) Variabel Pengangguran menunjukkan nilai *Centered VIF* sebesar  $1,648909 < 5$ , maka tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel Pengangguran.
- 3) Variabel Belanja Pemerintah menunjukkan nilai *Centered VIF* sebesar  $1,216942 < 5$ , maka tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel Belanja Pemerintah.

#### 4.2.1.2. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada suatu model regresi. Guna memastikan apakah model regresi linier terbebas dari autokorelasi, penelitian ini menggunakan metode *Brusch-Godfrey* atau *LM (Lagrange Multiplier) Test*. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dapat dilihat pada Probabilitas *F-statistic* pada tabel hasil uji autokorelasi. Jika nilai Probabilitas *F-statistic*  $>$  tingkat  $\alpha = 5\%$  maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika nilai Probabilitas *F-statistic*  $<$  tingkat  $\alpha = 5\%$  maka terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.705766	Prob. F(2,10)	0.2305
Obs*R-squared	4.069968	Prob. Chi-Square(2)	0.1307

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/26/19 Time: 21:31

Sample: 2003 2018

Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PERTUMBUHAN_EKONOMI)	-0.036661	0.141114	-0.259798	0.8003
LOG(PENGANGGURAN)	0.007215	0.067473	0.106925	0.9170
LOG(BELANJA_PEMERINTAH)	-0.002326	0.006194	-0.375570	0.7151
C	0.034436	0.466494	0.073818	0.9426
RESID(-1)	0.330848	0.307184	1.077036	0.3068
RESID(-2)	-0.522229	0.338205	-1.544118	0.1536
R-squared	0.254373	Mean dependent var		-1.67E-16
Adjusted R-squared	-0.118440	S.D. dependent var		0.052128
S.E. of regression	0.055129	Akaike info criterion		-2.678294
Sum squared resid	0.030392	Schwarz criterion		-2.388573
Log likelihood	27.42635	Hannan-Quinn criter.		-2.663458
F-statistic	0.682306	Durbin-Watson stat		1.888031
Prob(F-statistic)	0.647356			

*Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019*

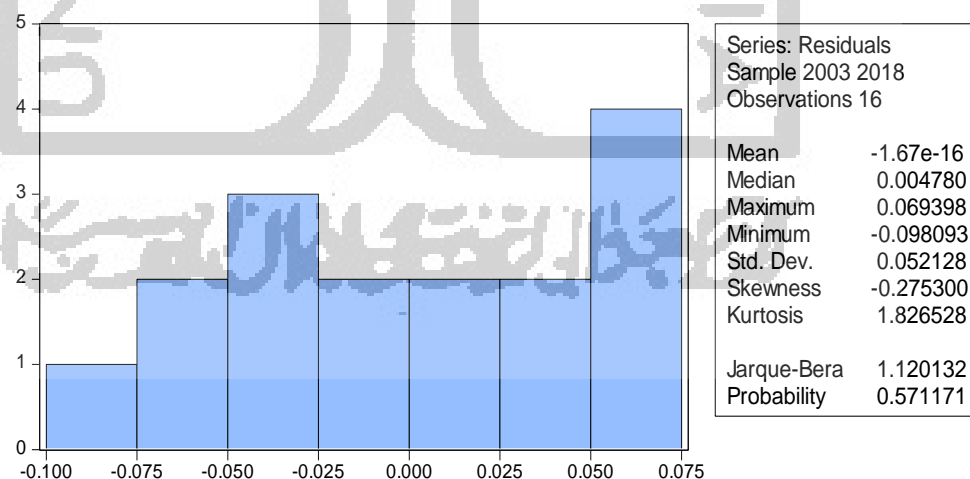
Pada tabel 4.6 diatas, nilai Probabilitas F (2,10) dapat disebut sebagai nilai Probabilitas *F-statistic*. Nilai Probabilitas *F-statistic* pada

penelitian ini menunjukkan hasil sebesar  $0,2305 > \alpha = 5\%$  yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

#### 4.2.1.3. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan (data) residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, bukan variabel independen ataupun variabel dependennya. Dalam penelitian ini, pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidaknya menggunakan *Jarque-Bera Test* dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (*Jarque-Bera*) hitung dengan tingkat *alpha* ( $\alpha$ ). Jika Probabilitas JB hitung  $>$  tingkat  $\alpha = 5\%$  maka residual terdistribusi normal, sebaliknya jika JB hitung  $<$   $\alpha = 5\%$  maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi dengan normal.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019

Pada tabel 4.7 diatas menunjukkan Probabilitas *Jarque-Bera* sebesar  $0,571171 > \alpha = 5\%$  yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

#### 4.2.1.4. Hasil Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dalam penelitian ini pengujian terhadap linieritas menggunakan *Ramsey Reset Test* dengan membandingkan nilai Probabilitas *F-statistic* dengan tingkat *alpha* ( $\alpha$ ). Jika nilai Probabilitas *F-statistic*  $> \alpha = 5\%$  maka dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi linearitas, sebaliknya jika nilai Probabilitas *F-statistic*  $<$  tingkat  $\alpha = 5\%$  maka model tidak memenuhi asumsi linearitas.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Linearitas**

Ramsey RESET Test  
Equation: UNTITLED  
Specification: LOG(KEMISKINAN) LOG(PERTUMBUHAN\_EKONOMI)  
LOG(PENGANGGURAN) LOG(BELANJA\_PEMERINTAH) C  
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	1.378039	11	0.1956
F-statistic	1.898992	(1, 11)	0.1956
Likelihood ratio	2.548062	1	0.1104

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.006001	1	0.006001
Restricted SSR	0.040760	12	0.003397
Unrestricted SSR	0.034759	11	0.003160
Unrestricted SSR	0.034759	11	0.003160

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	25.07811	12
Unrestricted LogL	26.35214	11

## Lanjutan tabel 4.8

Unrestricted Test Equation:  
 Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)  
 Method: Least Squares  
 Date: 07/26/19 Time: 21:34  
 Sample: 2003 2018  
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PERTUMBUHAN_EKONOMI)	-10.39931	7.333734	-1.418011	0.1839
LOG(PENGANGGURAN)	5.387917	3.800058	1.417851	0.1839
LOG(BELANJA_PEMERINTAH)	0.337335	0.238068	1.416968	0.1842
C	107.0456	73.25309	1.461311	0.1719
FITTED^2	-2.716565	1.971327	-1.378039	0.1956
R-squared	0.782756	Mean dependent var		6.333350
Adjusted R-squared	0.703758	S.D. dependent var		0.103280
S.E. of regression	0.056213	Akaike info criterion		-2.669018
Sum squared resid	0.034759	Schwarz criterion		-2.427584
Log likelihood	26.35214	Hannan-Quinn criter.		-2.656655
F-statistic	9.908556	Durbin-Watson stat		1.263457
Prob(F-statistic)	0.001197			

Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019

Pada tabel 4.8 diatas, menunjukkan nilai Probabilitas *F-statistic* sebesar  $0,1956 > \alpha = 5\%$  yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi.

### 4.2.1.5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Tujuan dilakukannya uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain pada suatu model regresi. Heterokedastisitas dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai Probabilitas *F-statistic* dengan tingkat *alpha* ( $\alpha$ ) menggunakan Uji *Glejser*. Jika nilai Probabilitas *F-statistic*  $> \alpha = 5\%$  maka tidak terjadi heterokedastisitas pada suatu model regresi, sebaliknya jika nilai

Probabilitas  $F$ -statistic  $< \alpha = 5\%$  maka telah terjadi heterokedastisitas pada suatu model regresi.

**Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.347413	Prob. F(3,12)	0.1241
Obs*R-squared	5.917153	Prob. Chi-Square(3)	0.1157
Scaled explained SS	1.375507	Prob. Chi-Square(3)	0.7113

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/26/19 Time: 21:41

Sample: 2003 2018

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.007437	0.016337	-0.455203	0.6571
LOG(PERTUMBUHAN_EKONOMI)	-0.001389	0.004588	-0.302756	0.7673
LOG(PENGANGGURAN)	0.003029	0.002517	1.203296	0.2521
LOG(BELANJA_PEMERINTAH)	-0.000604	0.000233	-2.587402	0.0238

R-squared	0.369822	Mean dependent var	0.002548
Adjusted R-squared	0.212278	S.D. dependent var	0.002392
S.E. of regression	0.002123	Akaike info criterion	-9.259680
Sum squared resid	5.41E-05	Schwarz criterion	-9.066533
Log likelihood	78.07744	Hannan-Quinn criter.	-9.249790
F-statistic	2.347413	Durbin-Watson stat	1.828465
Prob(F-statistic)	0.124136		

Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019



Pada tabel 4.9 diatas, nilai Probabilitas F (3,12) dapat disebut dengan nilai Probabilitas *F-statistic*. Probabilitas *F-statistic* menunjukkan nilai sebesar  $0,1241 > \alpha = 5\%$  yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

#### 4.2.2. Analisis Regresi Berganda

Dari hasil analisis regresi berganda menggunakan output *Eviews 7* menunjukkan nilai koefisien untuk tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan pada tabel 4.10 sebagai berikut :

**Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)  
 Method: Least Squares  
 Date: 07/26/19 Time: 21:27  
 Sample: 2003 2018  
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PERTUMBUHAN_EKONOMI)	-0.294529	0.125946	-2.338538	0.0375
LOG(PENGANGGURAN)	0.152095	0.069097	2.201171	0.0480
LOG(BELANJA_PEMERINTAH)	0.009378	0.006405	1.464166	0.1688
C	6.101699	0.448492	13.60492	0.0000

R-squared	0.745252	Mean dependent var	6.333350
Adjusted R-squared	0.681564	S.D. dependent var	0.103280
S.E. of regression	0.058281	Akaike info criterion	-2.634764
Sum squared resid	0.040760	Schwarz criterion	-2.441617
Log likelihood	25.07811	Hannan-Quinn criter.	-2.624873
F-statistic	11.70176	Durbin-Watson stat	1.451760
Prob(F-statistic)	0.000709		

*Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019*

Dari tabel 4.10 dapat dilihat hasil koefisien regresi untuk tiap-tiap variabel independen, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + e_t$$

$$Y_t = 6,101699 - 0,294529(0,0375) + 0,152095(0,0480) + 0,009378(0,1688) + e_t$$

Keterangan :

Y	=	Kemiskinan (ribu jiwa)
$\beta_0$	=	Koefisien Intersep
$\beta_1$	=	Koefisien Pertumbuhan Ekonomi
$\beta_2$	=	Koefisien Pengangguran
$\beta_3$	=	Koefisien Belanja Pemerintah
$X_1$	=	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
$X_2$	=	Pengangguran (ribu jiwa)
$X_3$	=	Belanja Pemerintah (ribu rupiah)
e	=	<i>Standard error</i>
t	=	Waktu

Dari hasil analisis regresi berganda maka dapat diperoleh suatu persamaan regresi dan nilai koefisien regresi untuk tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Interpretasi hasil regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -294529 dan menunjukkan hubungan negatif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018, yang artinya apabila terjadi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1%

akan menurunkan jumlah Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 sebesar 0,294%.

- 2) Variabel Pengangguran menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,152095 dan menunjukkan hubungan positif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018, yang artinya apabila terjadi peningkatan Pengangguran sebesar 1% akan meningkatkan jumlah Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 sebesar 0,152%.
- 3) Variabel Belanja Pemerintah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,009378 dan menunjukkan hubungan positif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Peningkatan Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

#### **4.2.3. Pengujian Statistik**

##### **4.2.3.1. Hasil Uji Koefisien Regresi Individual (Uji T)**

Uji koefisien regresi individual (Uji T) merupakan uji kelayakan model yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji koefisien regresi individual dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Probabilitas *t-statistic* dengan tingkat *alpha* ( $\alpha$ ) = 5%.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diketahui nilai Probabilitas *t-statistic* tiap-tiap variabel independen sebagai berikut :

- 1) Diperoleh nilai Probabilitas *t-statistic* variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar  $0,0375 < \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Diperoleh nilai Probabilitas *t-statistic* variabel Pengangguran sebesar  $0,0480 < \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengangguran secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Diperoleh nilai Probabilitas *t-statistic* variabel Belanja Pemerintah sebesar  $0,1688 > \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pemerintah secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4.2.3.2. Hasil Uji Signifikansi Model (Uji F)**

Uji signifikansi model (Uji F) merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi apakah layak atau tidak. Selain itu, uji ini ditujukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Uji signifikansi model dilakukan dengan membandingkan antara nilai Probabilitas *F-statistic* dengan tingkat *alpha* ( $\alpha$ ) = 5%.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diketahui nilai Probabilitas *F-statistic* sebesar  $0,000709 < \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

#### **4.2.3.3. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengukur persentase variasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, atau dapat dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai *R-squared* ( $R^2$ ).

Pada penelitian ini nilai  $R^2$  sebesar 0,745252, nilai tersebut menunjukkan besarnya pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kata lain, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan sebesar 0,745252 (74,52%), sedangkan sisanya 25,48% (100% - 74,52%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### **4.2.4. Pembahasan**

##### **4.2.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Pada rumusan hipotesis sebelumnya, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Dari hasil

analisis penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,294529 dan menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0,0375 lebih kecil dibandingkan dengan nilai *alpha* ( $\alpha$ ) = 5% yang menandakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, artinya saat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1%, maka akan menurunkan jumlah kemiskinan di D.I. Yogyakarta periode 2003-2018 sebesar 0,294%. Hal ini menunjukkan bahwa, hasil penelitian untuk variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil tersebut sesuai dengan rumusan hipotesis sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Waruwu, S.J (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang ada bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting di dalam mengatasi penurunan kemiskinan.

Fane dan War dalam Maipita, I (2014: 63), jika pertumbuhan yang dapat meningkatkan return terhadap faktor yang merupakan sumber pendapatan bagi penduduk miskin semakin besar, maka akan semakin besar pula kemungkinan dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Menurut Kuznet dalam Nisbah, F (2018), terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kemiskinan pada tahap awal pelaksanaan pembangunan ekonomi dan terjadi penurunan kemiskinan pada tahap akhir pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

#### **4.2.4.2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Pada rumusan hipotesis sebelumnya, pengangguran memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Dilihat dari hasil analisis penelitian ini, variabel pengangguran menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,152095 dan menunjukkan hubungan positif terhadap kemiskinan, nilai probabilitas *t-statistic* variabel pengangguran pada penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,0480 lebih kecil dibandingkan dengan nilai *alpha* ( $\alpha$ ) = 5% yang menandakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan dan Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, artinya apabila terjadi peningkatan pengangguran sebesar 1% akan meningkatkan jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 sebesar 0,152%. Dari hasil tersebut, variabel pengangguran menunjukkan pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan rumusan hipotesis sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irhamni (2018) yang menunjukkan bahwa pengangguran

memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan karena tingginya angka pengangguran akan menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori-teori yang ada yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Todaro dalam Nisbah, F (2018) pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat. Rendahnya kualitas hidup masyarakat dijabarkan ke dalam bentuk pendapatan yang rendah, tempat tinggal yang tidak memadai, kesehatan yang buruk, pendidikan yang terbatas, rendahnya angka fertilitas, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat serta rendahnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Rendahnya kesempatan dalam memperoleh suatu pekerjaan berarti pengangguran. Tingginya angka pengangguran disuatu daerah akan berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga akan jatuh miskin.

#### **4.2.4.3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan**

Pada rumusan hipotesis sebelumnya, belanja pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Dilihat dari hasil penelitian ini, variabel belanja pemerintah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,009378 dan menunjukkan hubungan positif terhadap kemiskinan, namun variabel belanja pemerintah tidak menunjukkan



adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, dapat dilihat dari nilai probabilitas *t-statistic* variabel belanja pemerintah sebesar 0,1688 lebih besar dibandingkan dengan nilai *alpha* ( $\alpha$ ) = 5% dan menandakan Hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima sehingga tidak sesuai dengan rumusan hipotesis sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asrianti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia” bahwa belanja pemerintah tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan sehingga pemerintah perlu memperhatikan ketepatan dalam penggunaan belanja daerah agar dapat merangsang aktifitas ekonomi di masyarakat dan mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

#### **4.2.4.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan**

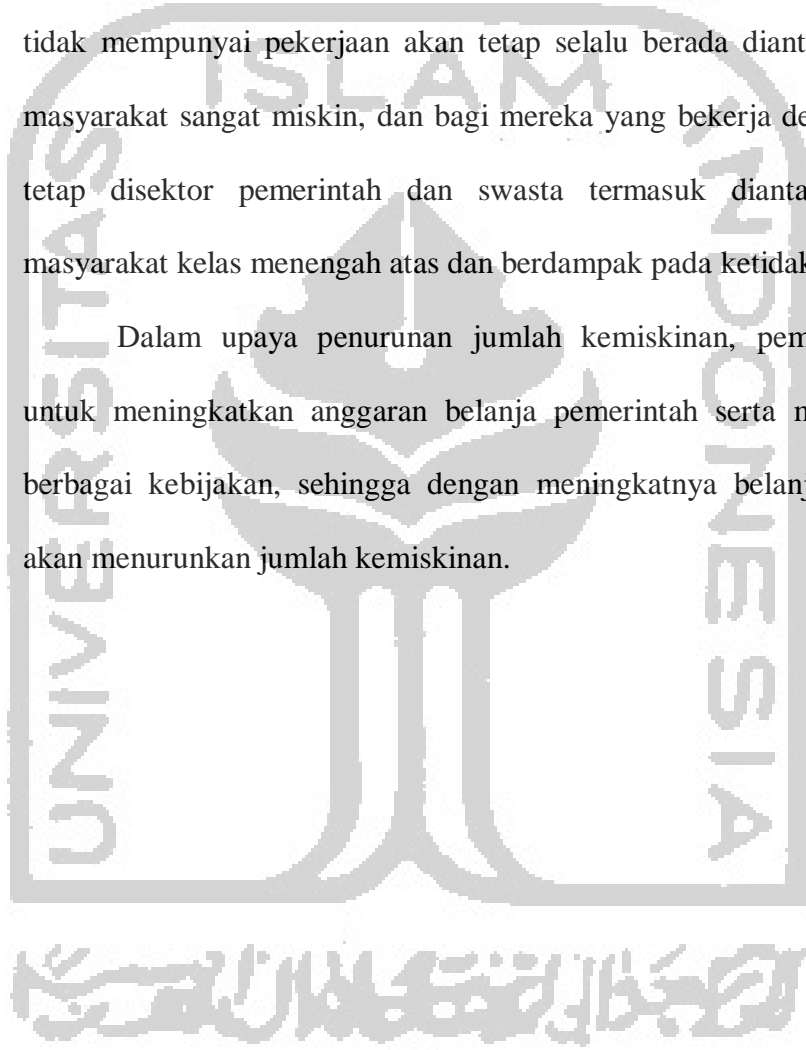
Dari hasil uji signifikansi model (Uji F), didapatkan nilai Probabilitas *F-statistic* sebesar  $0,000709 < \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan berdampak pada perekonomian disuatu wilayah menjadi lebih baik, sehingga akan akan menambah pendapatan yang dapat dibelanjakan yang

jika dikelola dengan baik akan berdampak pada penurunan kemiskinan di wilayah tersebut.

Hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran dengan jumlah kemiskinan, akan mengakibatkan sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan akan tetap selalu berada diantara kelompok masyarakat sangat miskin, dan bagi mereka yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah atas dan berdampak pada ketidakmerataan.

Dalam upaya penurunan jumlah kemiskinan, pemerintah perlu untuk meningkatkan anggaran belanja pemerintah serta mengupayakan berbagai kebijakan, sehingga dengan meningkatnya belanja pemerintah akan menurunkan jumlah kemiskinan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil uji dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pada penelitian ini, antara lain :

- 1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar  $-0,294529$  dan nilai Probabilitas *t-statistic* sebesar  $0.0375 < \alpha = 5\%$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan (Y) di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
- 2) Variabel Pengangguran ( $X_2$ ) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar  $0,152095$  dan menunjukkan nilai Probabilitas *t-statistic* sebesar  $0.0480 < \alpha = 5\%$ . Hal tersebut menandakan bahwa variabel Pengangguran ( $X_2$ ) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan (Y) di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
- 3) Variabel Belanja Pemerintah ( $X_3$ ) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar  $0,009378$  dan berhubungan positif terhadap kemiskinan. Nilai Probabilitas *t-statistic* variabel Belanja Pemerintah ( $X_3$ ) sebesar  $0.1688 > \alpha = 5\%$  yang artinya variabel Belanja Pemerintah ( $X_3$ ) tidak

menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (Y) di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

- 4) Variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), Pengangguran ( $X_2$ ) dan Belanja Pemerintah ( $X_3$ ) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (Y) di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Hal ini didasarkan pada hasil uji signifikansi model (Uji F) yang menunjukkan nilai Probabilitas *F-statistic* sebesar  $0,000709 < \alpha = 5\%$ .

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya penambahan variabel independen (bebas) lain yang berhubungan serta memiliki pengaruh terhadap kemiskinan diluar variabel independen pada penelitian ini, mengingat adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan dengan harapan dapat menghasilkan penelitian yang lebih menyeluruh.
- 2) Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga akan menurunkan jumlah kemiskinan.
- 3) Dalam upaya pengentasan kemiskinan pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan dalam ketenagakerjaan dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar membuka peluang bagi para

pengangguran untuk meningkatkan pendapatan yang akan berdampak pada penurunan kemiskinan.

- 4) Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan merancang berbagai kebijakan, program serta mengalokasikan belanja pemerintah agar dapat digunakan secara efisien dan terdistribusi dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
- 5) Untuk penelitian mendatang, diharapkan untuk menambahkan variabel independen (bebas) lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan, seperti Investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Penduduk di daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

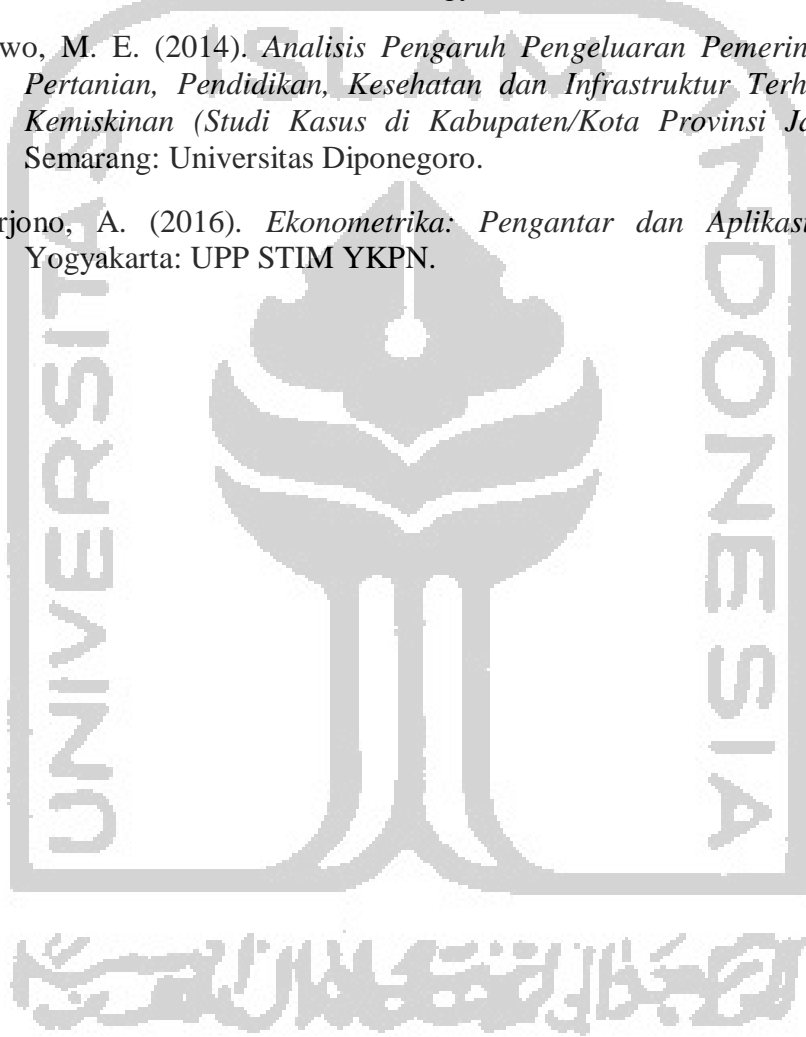
- Asrianti. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Bank, W. (2019, Juli 16). *World Development Report: Attacking Poverty*. Retrieved from World Bank: [siteresources.worldbank.org](http://siteresources.worldbank.org)
- Bappeda. (2019, Juli 23). *List Data Dasar*. Retrieved from Aplikasi Dataku: <http://bappeda.jogjaprovo.go.id>
- Bappenas. (2019, Juli 16). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Retrieved from Diagnosis Kemiskinan Bappenas: [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
- BPS. (2019, Juli 21). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2006/2007*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2007/04/17/0a649d1de71822f44f774650/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2006-2007>
- BPS. (2019, Juli 21). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2007*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2009/01/01/a5dc7f83caba19010ff0a3a3/diy-dalam-angka-2007>
- BPS. (2019, Juli 21). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2009*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2009/04/17/99019d1dd3d7446405a41c31/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2009.html>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2010*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2011/01/27/9f1dda06cd0022587c9a1f90/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2010>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2012/01/12/81613a2fb3f06135a8288a33/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2011>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2012/10/16/36fb59684e17406398dd7485/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2012>

- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2013/10/01/849cc90bb1e0a20aed2917fb/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2013>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2014/11/27/45a3ec0d044f535fc50a0992/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2014>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2015/11/16/a5900334e7d45e855906c4e7/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2015>
- BPS. (2019, Juli 21). *DIY Dalam Angka 2003*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2003/08/01/bb0790b8e318b323fd729033/diy-dalam-angka-2003>
- BPS. (2019, Juli 21). *DIY Dalam Angka 2004*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2009/01/01/23e61809c970f0957ad0600e/diy-dalam-angka-2004>
- BPS. (2019, Juli 21). *DIY Dalam Angka 2005*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2006/09/22/0784d0259b9884dc59f76aed/diy-dalam-angka-2005>
- BPS. (2019, Juli 23). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2018/08/16/ec8403f8694d2ff343d36d88/provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2018>
- BPS. (2019, Juli 23). *Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2016/07/15/1d15896048fabd5f7c48bff7/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2016>
- BPS. (2019, Juli 23). *Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2017*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:  
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2017/08/11/7da495dfa8657275f9da077b/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2017>

- Fadlillah, N., Sukiman, & Dewi, A. S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Eko-Regional*, 26.
- Fasholla, R. T. (2018). *Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011 – 2016*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Irhamni. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 97.
- Kemenkeu. (2019, Juli 15). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Retrieved from JDIH Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/105Tahun2000PP.html>
- Kemenkeu. (2019, Juli 15). *Undang-Undang Republik Indonesia*. Retrieved from JDIH Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/17Tahun2003UU.html>
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan* (1 ed.). (Fitrawaty, Ed.) Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maipita, I., Jantan, M. D., & Razak, N. A. (2010). *Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makro Ekonomi*. (L. Fitria, & I. Nurmawan, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Nisbah, F. (2018). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo dan Langkat*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (3 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Retrieved 2019
- Suryani, E. (2006). Analisis Faktor Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 95.



- Susiaturun, E. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Waruwu, S. J. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Wibowo, M. E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya* (4 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



## LAMPIRAN

### I. Jumlah Kemiskinan Provinsi D.I.Y Periode 2003-2018

No	Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)
1	2003	636.8
2	2004	616.2
3	2005	625.8
4	2006	648.7
5	2007	633.5
6	2008	608.9
7	2009	544.9
8	2010	540.5
9	2011	564.2
10	2012	565.7
11	2013	541.9
12	2014	532.5
13	2015	550.2
14	2016	494.9
15	2017	488.5
16	2018	460.1

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

## II. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I.Y Periode 2003-2018

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2003	4,58
2	2004	5,14
3	2005	4,73
4	2006	3,69
5	2007	4,31
6	2008	5,02
7	2009	4,39
8	2010	4,87
9	2011	5,16
10	2012	5,32
11	2013	5,40
12	2014	5,18
13	2015	4,95
14	2016	5,05
15	2017	5,41
16	2018	7,50

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

### III. Jumlah Pengangguran Provinsi D.I.Y Periode 2003-2018

No	Tahun	Pengangguran (Ribuan Jiwa)
1	2003	143.89
2	2004	113.56
3	2005	93.50
4	2006	117.02
5	2007	115.20
6	2008	107.33
7	2009	121.04
8	2010	107.14
9	2011	83.48
10	2012	76.81
11	2013	63.17
12	2014	67.41
13	2015	80.24
14	2016	57.03
15	2017	64.01
16	2018	73.35

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

#### IV. Belanja Pemerintah Provinsi D.I.Y Periode 2003-2018

No	Tahun	Belanja Pemerintah (Ribu Rp)
1	2003	524.487.355
2	2004	670.712.040
3	2005	768.498.592
4	2006	968.386.066
5	2007	1.067.390.920
6	2008	1.629.069.251
7	2009	1.412.048.985
8	2010	1.394.446.100
9	2011	1.590.785.711
10	2012	2.053.825.959
11	2013	2.509.643.374
12	2014	2.981.068.320
13	2015	3.911.107.930
14	2016	4.270.072.673
15	2017	5.279.617.119
16	2018	5.608.293.291

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

## V. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 07/26/19 Time: 21:29

Sample: 2003 2018

Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(PERTUMBUHAN_EKO NOMI)	0.015862	194.6121	1.523825
LOG(PENGANGGURAN)	0.004774	455.8052	1.648909
LOG(BELANJA_PEMERINTA H)	4.10E-05	2.246023	1.216942
C	0.201145	947.4927	NA

*Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019*

## VI. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.705766	Prob. F(2,10)	0.2305
Obs*R-squared	4.069968	Prob. Chi-Square(2)	0.1307

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/26/19 Time: 21:31

Sample: 2003 2018

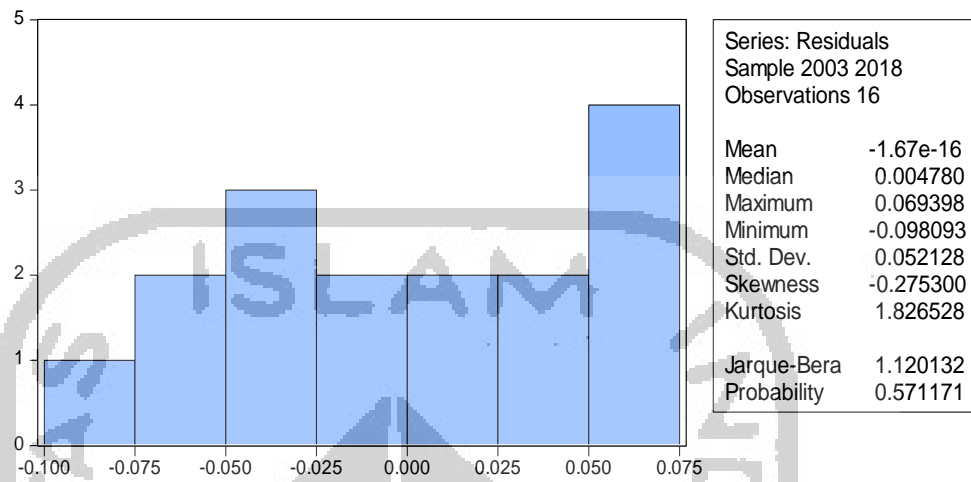
Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PERTUMBUHAN_EKONOMI)	-0.036661	0.141114	-0.259798	0.8003
LOG(PENGANGGURAN)	0.007215	0.067473	0.106925	0.9170
LOG(BELANJA_PEMERINTAH)	-0.002326	0.006194	-0.375570	0.7151
C	0.034436	0.466494	0.073818	0.9426
RESID(-1)	0.330848	0.307184	1.077036	0.3068
RESID(-2)	-0.522229	0.338205	-1.544118	0.1536
R-squared	0.254373	Mean dependent var		-1.67E-16
Adjusted R-squared	-0.118440	S.D. dependent var		0.052128
S.E. of regression	0.055129	Akaike info criterion		-2.678294
Sum squared resid	0.030392	Schwarz criterion		-2.388573
Log likelihood	27.42635	Hannan-Quinn criter.		-2.663458
F-statistic	0.682306	Durbin-Watson stat		1.888031
Prob(F-statistic)	0.647356			

Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019

## VII. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019





## VIII. Hasil Uji Linearitas

Ramsey RESET Test  
 Equation: UNTITLED  
 Specification: LOG(KEMISKINAN) LOG(PERTUMBUHAN\_EKONOMI)  
 LOG(PENGANGGURAN) LOG(BELANJA\_PEMERINTAH) C  
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	1.378039	11	0.1956
F-statistic	1.898992	(1, 11)	0.1956
Likelihood ratio	2.548062	1	0.1104

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.006001	1	0.006001
Restricted SSR	0.040760	12	0.003397
Unrestricted SSR	0.034759	11	0.003160
Unrestricted SSR	0.034759	11	0.003160

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	25.07811	12
Unrestricted LogL	26.35214	11

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)  
 Method: Least Squares  
 Date: 07/26/19 Time: 21:34  
 Sample: 2003 2018  
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PERTUMBUHAN_EKONOMI)	-10.39931	7.333734	-1.418011	0.1839
LOG(PENGANGGURAN)	5.387917	3.800058	1.417851	0.1839
LOG(BELANJA_PEMERINTAH)	0.337335	0.238068	1.416968	0.1842
C	107.0456	73.25309	1.461311	0.1719
FITTED^2	-2.716565	1.971327	-1.378039	0.1956

R-squared	0.782756	Mean dependent var	6.333350
Adjusted R-squared	0.703758	S.D. dependent var	0.103280
S.E. of regression	0.056213	Akaike info criterion	-2.669018
Sum squared resid	0.034759	Schwarz criterion	-2.427584
Log likelihood	26.35214	Hannan-Quinn criter.	-2.656655
F-statistic	9.908556	Durbin-Watson stat	1.263457
Prob(F-statistic)	0.001197		

Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019

## IX. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.347413	Prob. F(3,12)	0.1241
Obs*R-squared	5.917153	Prob. Chi-Square(3)	0.1157
Scaled explained SS	1.375507	Prob. Chi-Square(3)	0.7113

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/26/19 Time: 21:41

Sample: 2003 2018

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.007437	0.016337	-0.455203	0.6571
LOG(PERTUMBUHAN_EKONOMI)	-0.001389	0.004588	-0.302756	0.7673
LOG(PENGANGGURAN)	0.003029	0.002517	1.203296	0.2521
LOG(BELANJA_PEMERINTAH)	-0.000604	0.000233	-2.587402	0.0238
R-squared	0.369822	Mean dependent var		0.002548
Adjusted R-squared	0.212278	S.D. dependent var		0.002392
S.E. of regression	0.002123	Akaike info criterion		-9.259680
Sum squared resid	5.41E-05	Schwarz criterion		-9.066533
Log likelihood	78.07744	Hannan-Quinn criter.		-9.249790
F-statistic	2.347413	Durbin-Watson stat		1.828465
Prob(F-statistic)	0.124136			

Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019

## X. Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)

Method: Least Squares

Date: 07/26/19 Time: 21:27

Sample: 2003 2018

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PERTUMBUHAN_EKONOMI)	-0.294529	0.125946	-2.338538	0.0375
LOG(PENGANGGURAN)	0.152095	0.069097	2.201171	0.0480
LOG(BELANJA_PEMERINTAH)	0.009378	0.006405	1.464166	0.1688
C	6.101699	0.448492	13.60492	0.0000
R-squared	0.745252	Mean dependent var		6.333350
Adjusted R-squared	0.681564	S.D. dependent var		0.103280
S.E. of regression	0.058281	Akaike info criterion		-2.634764
Sum squared resid	0.040760	Schwarz criterion		-2.441617
Log likelihood	25.07811	Hannan-Quinn criter.		-2.624873
F-statistic	11.70176	Durbin-Watson stat		1.451760
Prob(F-statistic)	0.000709			

Sumber : Output Eviews 7, diolah tahun 2019